



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKHMAD HUSAIN**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **178323**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.799.987.230

1. Tanah Seluas 595 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 1250 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/96 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 1600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 1250 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/30 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/41 m2 di KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 719.987.230
11. Tanah Seluas 196 m2 di KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
12. Tanah Seluas 132 m2 di KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp.



90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

24.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

12.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

190.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

326.042.078

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

2.340.029.308

III. HUTANG

Rp.

320.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.020.029.308

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.